

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah antara yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti, diukur dengan menggunakan opini audit BPK RI dan skor EKPPD pemerintah kabupaten/kota yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti Nuritomo & Rossieta (2014), Iqbal (2015), Adzani & Martani (2014) dan Asako *et al.*, (2012) menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah. Politik dinasti dinyatakan berpengaruh negatif dan menurut beberapa berita pada media massa politik dinasti sering dikaitkan dengan tindakan korupsi.

Berikut merupakan kajian hasil pengujian yang diperoleh dari uji beda *Mann whitney* :

- a. Tidak ada perbedaan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah antara daerah yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti. Dalam penelitian ini, dilihat dari rata-rata opini audit, menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintahan kabupaten/kota yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti sama-sama baik. Hal tersebut

ditunjukkan dari rata-rata pemerintahan kabupaten/kota memiliki opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

- b. Tidak ada perbedaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan antara daerah yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti. Berdasarkan rata-rata skor EKPPD, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah antara pemerintahan kabupaten/kota yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti sama-sama baik. Hal tersebut terlihat dari skor EKPPD pada variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagian besar bersatus tinggi.

Berdasarkan beberapa hasil tersebut dapat dikatakan bahwa politik dinasti bukan merupakan faktor yang mengganggu jalannya pengelolaan keuangan yang akuntabel maupun penyebab penurunan kinerja pemerintah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dibawah ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini.

- Data yang digunakan bersifat tidak normal sehingga harus melakukan uji nonparametrik *mann whitney test*.
- Jumlah data laporan keuangan yang tersedia masih sedikit dan laporan BPK-RI yang tersedia terbatas, sehingga dalam penelitian hanya memperoleh 40 Pemerintahan kabupaten/kota.
- Metode pencarian data politik dinasti dilakukan secara manual yang kemungkinan dapat terjadi *self selection bias*. Dalam penelitian ini telah berupaya memperoleh kebenaran dan validitas data keuangan terkait dengan total aset, total pendapatan dan belanja.

5.3. Saran

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

- a. Penelitian mendatang perlu adanya pengembangan terkait dengan metode penentuan pemerintah yang terindikasi dinasti politik dengan menggunakan informasi dari pihak independen yang terpercaya, seperti survey Ombudsman, survey indeks kepuasan dan perilaku organisasi dalam pemerintahan tersebut.
- b. Penelitian mendatang diharapkan juga mengukur kinerja pemerintah dan adanya indikasi dinasti politik di tingkat provinsi karena porsi otonomi daerah di Indonesia lebih ditekankan pada pemerintahan daerah tingkat I yaitu provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adninda, Desiana R. 2012. “Pelanggengan Dinasti Politik „Samawi“ Sebuah Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis dalam Pilkada Bantul Tahun 2010”, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.3 No.2.
- Adzani, A. H. & Dwi Martani. 2014. “Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidapatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Simposium Nasional Akuntansi XVII: Mataram, Lombok*.
- Anggraini, Nikma Ragil dan Ikhsaan Budi Riharjo. 2017. PENGARUH POLITIK DINASTI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DENGAN PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6. Nomor 6.
- Asako, Y., T. Iida, T. Matsubayashi and M.Ueda. 2010. *Dynastic Politicians: Theory And Evidence From Japan. Working Papers. Waseda University Organization for Japan-US Studies.*
- Bisma & Susanto, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mataram
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. “Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting” in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan III. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Hendriyadi. 2008. Content Validity. Teori Online Personal Paper Nomor 1

- Hirawan, Susiyati B. 2007. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia". Pidato. Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Irmawati, Febriana Diah dan Suryo Pratolo. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti, Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012 – 2013. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Jaya, Wihana Kirana. 2010. "Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan". *Pidato*. Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Kautsar, Iqbal. 2015. Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Yogyakarta. Skripsi Universitas Gadjah Mada
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Mahsun, dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik: Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFYogyakarta
- Mendoza, R.U., Beja Jr, E.L., Venida, V.S., & Yap, D.B. 2013. "Political Dynasties and Poverty: Resolving The „Chicken or The Egg“ Question", Working Paper, Asian Institute of Management.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriarsi. 2012. PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTADI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
- Nuritomo & Hilda Rossieta. 2014. "Politik Dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi XVII*: Mataram, Lombok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pusdiklatwas, BPKP. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi kelima.

Querrubin, P. 2011. "Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in The Philippines", *Harvard Academy for International and Area Studies*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

World Bank dan BKF Kementerian Keuangan RI. 2011. "Analisis Hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Pelayanan Dasar Publik di Indonesia. Improving the Policy Framework for Fiscal Decentralisation (the Grand Design of Fiscal Decentralization)" Working Paper. Jakarta

Wiyono, Gendro. 2011. Merancang penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 dan SmartPLS 2.0. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Berita Media Masa

Beritagar: Muhammad Nur Rochmi. 2017. Kinerja Pemerintah Daerah Masih Rendah. Diakses 14 Februari 2018 dari Beritagar pada, <https://beritagar.id/artikel/berita/kinerja-pemerintah-daerah-masih-rendah>

CNN Indonesia: Abraham Utama. 2015. MK Anulir Larangan Politik Dinasti di Pilkada. Diakses 14 Februari 2018 dari CNN Indonesia pada, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150708143504-32-65195/mk-anulir-larangan-politik-dinasti-di-pilkada/>

Kompas: Icha Rastika. 2013. *Penahanan Ratu Atut Terkait Kasus Pilkada Lebak*. Diakses 25 Februari 2018, dari Harian Kompas Nasional pada, <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/20/1724263/Penahanan.Ratu.Atut.Terkait.Kasus.Pilkada.Lebak>

Kompas: Ambaranie Nadia. 2017. Kasus Korupsi di Klaten dan Banten Dianggap Contoh Sempurna Dinasti Politik. Diakses 1 April 2018 dari Harian Kompas Nasional pada, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/12583761/kasus.korupsi.di.klaten.dan.banten.dianggap.contoh.sempurna.dinasti.politik>.

Kompas: Deytri R. Aritonang. 2013. "60 Orang yang Terlibat Politik Dinasti!". Diakses 14 Februari 2018, dari Harian Kompas Nasional pada, <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/18/1850579/60.Orang.yang.Terlibat.Politik.Dinasti>

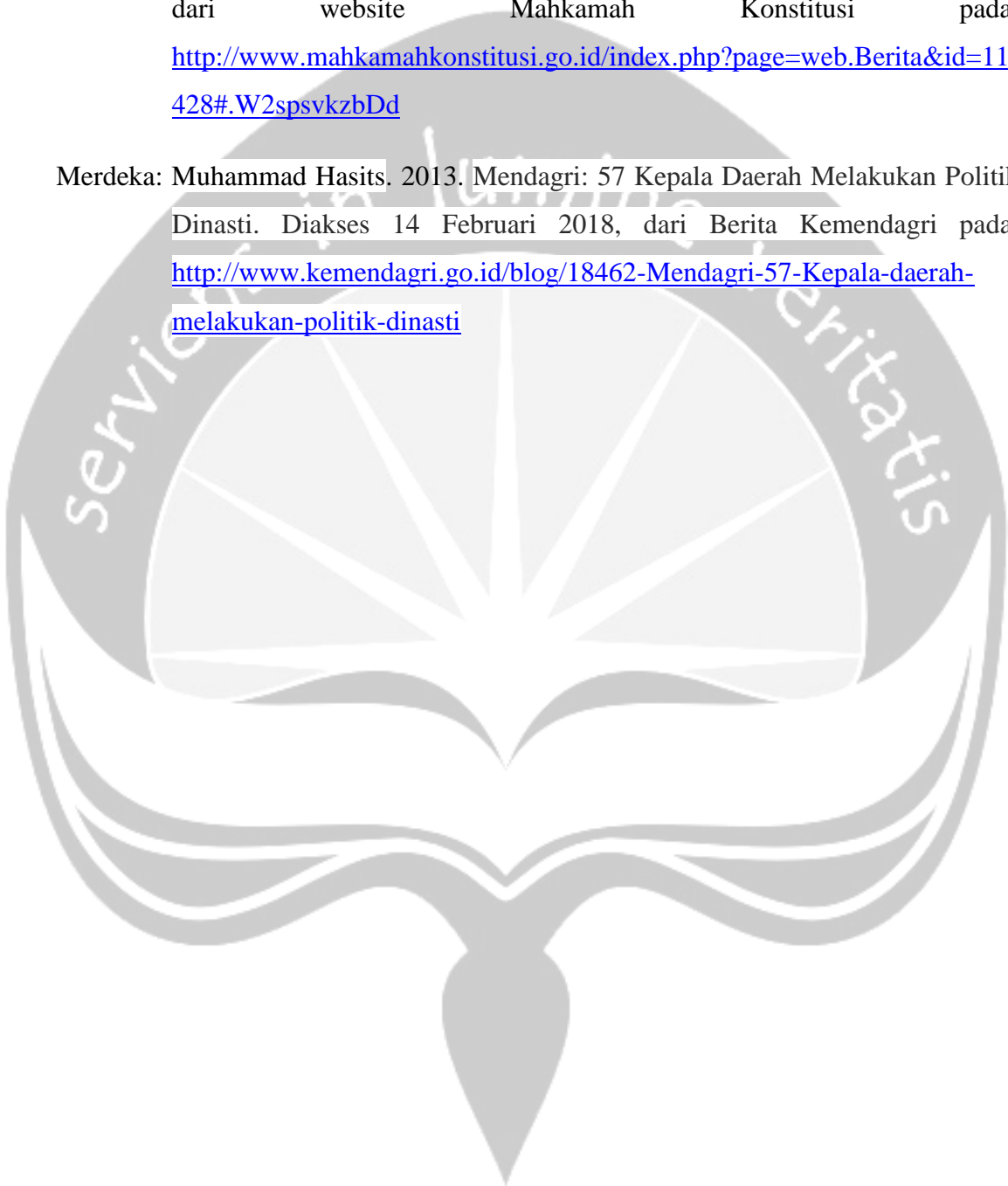
Kompas: Lutfy Mairizal Putra. 2017. "Jadi yang Terbaik Selama Tiga Tahun Berturut, 7 Pemda Raih Penghargaan". Diakses 15 Februari 2018, dari Harian Kompas Nasional pada, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/25/15515121/jadi.yang.terbaik.selama.tiga.tahun.berturut.7.pemda.raih.penghargaan>

Kompasiana: Himam Miladi. 2013. "Inilah Daftar Daerah yang Menjalankan Politik Dinasti". Diakses 14 Februari 2018, dari Kompasiana pada, <https://www.kompasiana.com/primata/5528d116f17e61680b8b4578/inilah-daftar-daerah-yang-menjalankan-politik-dinasti>

Sindo News: Emerson Yuntho. 2017. "Korupsi Kepala Daerah dan Dinasti Politik". Diakses 2 Maret 2018, dari Koran Sindo pada, <https://nasional.sindonews.com/read/1176220/18/korupsi-kepala-daerah-dan-dinasti-politik-1485957838>

Mahkamah Konstitusi. 2015. Pengertian Politik Dinasti. Diakses 14 Februari 2018, dari website Mahkamah Konstitusi pada, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11428#.W2spsvkzbDd>

Merdeka: Muhammad Hasits. 2013. Mendagri: 57 Kepala Daerah Melakukan Politik Dinasti. Diakses 14 Februari 2018, dari Berita Kemendagri pada, <http://www.kemendagri.go.id/blog/18462-Mendagri-57-Kepala-daerah-melakukan-politik-dinasti>





LAMPIRAN

Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Akuntabilitas	Based on Mean	,436	1	238	,510
	Based on Median	1,078	1	238	,300
	Based on Median and with adjusted df	1,078	1	189,682	,301
	Based on trimmed mean	,277	1	238	,599
Kinerja PP	Based on Mean	2,402	1	238	,123
	Based on Median	,614	1	238	,434
	Based on Median and with adjusted df	,614	1	215,453	,434
	Based on trimmed mean	1,476	1	238	,226

